

**PEMBINAAN PROGRAM USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA
SEJAHTERA (UPPKS) DI KECAMATAN LUBUK SIKAPING KABUPATEN
PASAMAN**

Oleh : Jerri Adam (1401120175)

Jerriadam36@gmail.com

Pembimbing : Zulkarnaini

Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272

Abstract

Coaching is an effort, action and activity carried out in an efficient manner to obtain better result, While the (UPPKS) program is a program formed by the government aimed at women who participate in family planning with various stages of a prosperous family that is prioritized to those who are less able to meet the needs in their families.so that they are given coaching to carry out business through the formation groups until they are independent in entrepreneurship or meet the economic needs of their families.this study aims to find out how and factors that influence the business program to increase the income of a prosperous family in lubuk sikaping subdistrict, pasaman regency.researches used a qualitative descriptive approach using a purposive sampling methods with data collection techniques using interview, observasion, and documentation.the theoretical concept used is the concept of coaching implementation according to santoso, namely the provision of guidance, provision of forums, education or training and field checking including influencing factors. The result of this study can be seen that the UPPKS group coaching is carried out by the population control and family planning (DPPKB) pasaman regency is not yet optimal, the factors that influence the implementation of this guidance are human resources , budget and business acces.

Keywords: Coaching, UPPKS Program.

Latar Belakang

Kemandirian masyarakat merupakan tujuan pembangunan nasional berupa kematangan dan kedewasaan masyarakat secara ideologi, politik, ekonomi dan sosial dalam bingkai negara kesatuan republik Indonesia. Untuk itu organisasi pemerintahan dan non pemerintah serta masyarakat mesti bertanggung jawab dalam pelaksanaannya, sehingga kesejahteraan masyarakat, dan kesejahteraan negara terwujud dengan baik.

Salah satu upaya yang telah dan perlu terus dilakukan pemerintah adalah dengan pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kualitas penduduk melalui program keluarga berencana. program keluarga berencana nasional di atur dalam undang undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, disebutkan bahwa yang di maksud dengan keluarga berencana (KB) adalah suatu upaya peningkatan kepedulian akan peran serta

masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kehamilan, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga, untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Program keluarga berencana nasional tak hanya menjalankan program KB guna mengatasi ledakan penduduk saja, namun juga menyelenggarakan program lain seperti kesehatan reproduksi remaja, program ketahanan keluarga serta program penguatan keluarga kecil berkualitas melalui program UPPKS.

Berdasarkan peraturan daerah No. 22 tahun 2007 yang melaksanakan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan KB. Maka ditetapkan tujuan pembentukan UPPKS yaitu meningkatkan kesejahteraan peserta KB dan calon peserta KB terutama keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1, anggota kelompok UPPKS melalui proses pembelajaran usaha dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga, kesertaan dan kemandirian ber-KB. Sedangkan tujuan khusus program UPPKS ini antara lain :

- Sebagai proses belajar usaha ekonomi produktif
- Meningkatkan sikap dan perilaku anggota untuk hidup lebih sejahtera.
- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga membangun ketahanan ekonomi keluarga
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- Meningkatkan jiwa kewirausahaan dan meningkatkan kondisi ekonomi dalam keluarga.

Selain tujuan diatas dinas DPPKB selaku Pembina memiliki sasaran program UPPKS yakni yang akan menjadi anggota UPPKS antara lain :

- Keluarga pra sejahtera
Yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti kebutuhan akan spiritual, pangan, papan, sandang dan kesehatan.
- Keluarga sejahtera 1.
Yaitu keluarga yang telah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosialnya seperti pendidikan, tempat tinggal, dan transportasi.
- Keluarga sejahtera 2 dan seterusnya.
Yaitu keluarga yang telah mampu memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan fisik sosialnya.
- Akseptor KB.
Yaitu anggota masyarakat yang mengikuti gerakan KB dengan melaksanakan penggunaan alat kontrasepsi.
- Anggota masyarakat lainnya yang belum ber-KB.

Dengan pembentuka anggota kelompok UPPKS terdiri dari keluarga pra-sejahtera dan keluarga sejahtera1, keluarga sejahtera dengan tahapan yang lebih tinggi, dan anggota kelompok masyarakat yang berminat dalam mengembangkan usaha kelompok dan yang menjadi anggota kelompok UPPKS adalah ibu ibu dan para akseptor KB.

Berdasarkan peraturan kepala dinas pengendalian penduduk kabupaten pasaman (DPPKB) No.236/PER/F32010. Pembinaan kelompok UPPKS merupakan pembinaan untuk seluruh pengurus dan anggota kelompok, adapun materi pembinaanya mencakup pembinaan organisasi,

permodalan, administrasi pembukuan dan kesertaan ber-KB. Cara pembinaan kelompok UPPKS ini dengan melakukan kunjungan kerumah, pertemuan atau rapat anggota dan kunjungan ke seluruh kelompok dalam rangka tukar menukar pengalaman dan saling bantu-membantu memasarkan produk.

Ukuran indikator keberhasilan kelompok UPPKS dalam mengembangkan usaha produktif untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga adalah

- a. Meningkatnya kesertaan dan kemandirian ber-KB pada anggota UPPKS terutama keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1.
- b. Meningkatnya jumlah kegiatan dan keragaman jenis usaha kelompok
- c. Meningkatnya kualitas produksi usaha kelompok UPPKS
- d. Meningkatnya tahapan kesejahteraan anggota kelompok UPPKS.
- e. Meningkatnya dinamika anggota kelompok UPPKS

Melihat fenomena saat ini kegiatan program UPPKS ini banyak mengalami kemunduran, kemunduran ini terlihat dari menurunnya aktivitas kelompok dan kualitas kegiatan di dalam kelompok seperti berikut ini :

1. Lemahnya tokoh ketua atau pengurus dalam membimbing anggota, ini terlihat para anggota kelompok yang kurang mandiri atau masih tergantung pada sikap ketua pengurus.
2. Pembinaan yang dilakukan petugas Dinas DPPKB belum kontinew atau masih menyangkut pelaporan dan pembukuan, didalam peraturan disebutkan bahwa Pembina harus melakukan pembinaan minimal

sekali sebulan namun kelompok UPPKS mengaku jarang diberi pembinaan. Pihak DPPKB hanya menerima laporan bulanan dari Pembina/pengurus kelompok UPPKS.

3. Sulitnya memperoleh modal, saat ini ketua pengurus kelompok hanya mencari modal melalui pinjaman dari bank, dari sebelumnya mereka memperoleh bantuan dari BAZNAS sebagai pengganti amil zakat.
4. Masih lemahnya kelompok dalam menentukan jenis usaha yang sesuai selera potensi daerah, hasil produksi kelompok usaha UPPKS masih sulit bersaing di pasaran dimana masyarakat sebagai konsumen belum mendapat perhatian
5. Kesulitan dalam akses pemasaran, produksi kelompok UPPKS yang berupa usaha rumahan mengaku belum menguasai teknologi sebagai akses mempermudah akses pemasaran.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pembinaan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terhambatnya pembinaan program usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (uppkS) di kecamatan lubuk sikaping kabupaten pasaman?

Konsep Teori

Menurut **Effendi (2003:24)** menyimpulkan pembinaan adalah pendidikan dalam rangka perbaikan dan pembaharuan suatu kondisi pada perorangan, kelompok, maupun dalam aspek bidang lainnya secara langsung termasuk dalam bidang ekonomi, sosial budaya dan

bidang politik, sehingga dengan mulai pendidikan itu dapat mencapai titik maksimal.

Menurut **santoso (2010:23)** proses pembinaan untuk mencapai hasil yang baik diperlukan yaitu :

1. Adanya bimbingan
2. Pemberian wadah
3. Adanya pelatihan dalam pengembangan karir
4. Memberi pengawasan dalam arti pantauan langsung ke lapangan

Menurut **Sujianto (2008:32)** mendefinisikan program adalah suatu kompleks dari tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, peraturan-peraturan, pemberian tugas dan langkah-langkah yang harus diambil, sumber-sumber yang harus dimanfaatkan dan elemen-elemen lain yang diperlukan untuk melaksanakan arah dan tindakan tertentu.

Manajemen adalah Suatu cara atau seni mengelola sesuatu untuk dikerjakan oleh orang lain. Untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien yang bersifat massif dan kompleks yang bernilai tinggi yang dibutuhkan manajemen. Sumber daya manusia merupakan kekayaan (asset) organisasi yang harus didayagunakan secara optimal sehingga diperlukannya suatu manajemen untuk mengatur sumber daya manusia sedemikian rupa guna mencapai tujuan yang telah di tetapkan sejak awal.

Adapun menurut **Siswanto (2005:7)** mengatakan manajemen adalah ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan. Manajemen sebagai suatu ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang di sistematikan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasi.

Sementara itu, **Badrudin (2014:21)** membagi sumber-sumber manajemen kedalam 6 m yaitu:

- a. *Man* yaitu tenaga kerja manusia, baik tenaga kerja pimpinan maupun tenaga kerja operasional.
- b. *Money* yaitu uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.
- c. *Methods* yaitu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan.
- d. *Materials* yaitu bahan-bahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
- e. *Machines* yaitu mesin atau alat yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
- f. *Market* yaitu penjualan barang dan jasa.

Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian Dilakukan Di Kecamatan Lubuk Sikaping Pada Kantor Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman .

3. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan *teknik purposif sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu Sugiyono (2014:85), penulis memilih informan yang penulis anggap mengetahui tentang permasalahan penelitian. Adapun yang menjadi informan yang akan memberikan keterangan tambahan demi mendapatkan data yang utuh dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Bidang Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Pasaman.
2. Kasi Kesejahteraan Dan Ketahanan Keluarga DPPKB Kabupaten Pasaman.

3. Ketua Kelompok UPPKS Kabupaten Pasaman.
4. Anggota Kelompok UPPKS Kabupaten Pasaman.

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan observasi secara langsung pada data yang dibutuhkan terkait dari informasi mengenai pembinaan program usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) di kecamatan lubuk sikaping kabupaten pasaman.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung. Dapat melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder tersebut terdiri dari:

- a. Data yang diperoleh langsung dari objek penelitian di Kantor Dinas DPPKB Kabupaten Pasaman.
- b. Informasi tentang proses pembinaan program UPPKS di Kantor DPPKB kabupaten pasaman.
- c. Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Sejarah Kabupaten pasaman.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diperlukan untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan untuk dapat menjelaskan dan menjawab permasalahan penelitian ini. Teknik pengumpulan ini dilakukan dengan cara :

a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Secara luas, observasi atau pengamatan berarti setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran. Akan tetapi, observasi atau pengamatan disini

diartikan lebih sempit, yaitu pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pada penelitian ini observasi dilakukan di dinas pengenalan penduduk dan keluarga berencana DPPKB kabupaten pasaman.

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.

b. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. **Reiner** menjelaskan istilah dokumen dalam tiga pengertian (1) dalam arti luas, yaitu yang meliputi semua sumber, baik sumber tertulis maupun sumber lisan (2) dalam arti sempit, yaitu yang meliputi semua sumber tertulis saja dan (3) dalam arti spesifik, yaitu hanya yang meliputi surat-surat resmi dan surat-surat negara, seperti surat perjanjian, undang-undang, konsesi, hibah dan sebagainya.

3.6 Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa deskriptif kualitatif yaitu analisa data yang memberikan gambaran yang jelas dan terperinci berdasarkan kenyataan yang ditemukan dilapangan melalui hasil wawancara yang kemudian ditarik suatu kesimpulan. Pengkajian secara deskriptif yaitu kata lain penjabaran dilakukan menggambarkan atau menjelaskan masalah yang ada atau berusaha menggambarkan secara terperinci berdasarkan kenyataan dilapangan serta memberikan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan untuk mendapatkan solusi dalam Pelaksanaan

program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang dikelola oleh DPPKB Kabupaten Pasaman.

Menurut Miles dan Huberman dalam Emzir (2012) ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan. Pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian "data mentah" yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Reduksi data terjadi secara kontinu melalui kehidupan suatu proyek yang diorientasikan secara kualitatif.

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis data yang mempertajam memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

2. Model Data

Langkah kedua dari kegiatan analisis data adalah model data. Peneliti mendefinisikan "model" sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan. Model tersebut mencakup jenis matrik, grafik, jaringan kerja dan bagan. Semua dirancang untuk merakit informasi yang tersusun dalam suatu yang dapat diakses secara langsung, bentuk yang praktis.

Penarikan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dan aktivitas analisis adalah penarikan kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan apakah "makna" sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal dan proposisi-proposisi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. **Pembinaan Program usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) di kecamatan lubuk sikaping kabupaten pasaman.** Aktivitas dalam pelaksanaan UPPKS difasilitasi, didampingi dan dibina oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) untuk memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia (bahan baku, keahlian anggota, permintaan pasar, dan modal) dalam menjalankan ekonomi produktif .peningkatan kemampuan anggota dan kelompok menjadi focus kegiatan disamping mempermudah akses modal hingga mitra kerja.

Tujuan dari pelaksanaan UPPKS secara umum memberikan keseragaman petunjuk pelaksanaan kepada para pengelola dan pelaksana dalam membina kelompok serta keterampilan bagi pengurus dalam mengelola kelompok.

Dalam pembinaan kelompok masih banyak permasalahan yang dihadapi mulai dari dalam kelompok itu sendiri seperti semangat diri dalam berwirausaha maupun dari luar kelompok terbatasnya sarana dan pra sarana, hal ini menjadi pertimbangan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Pasaman tentang permasalahan dalam kelompok usaha ini.

Menurut Santoso (2010:23) Pembinaan program untuk mencapai hasil yang baik diperlukan proses pembinaan yaitu :

1. Adanya bimbingan.
2. Pemberian wadah
3. Pelatihan dan pengembangan karir
4. Memberikan pengawasan dalam arti tinjauan langsung ke lapangan

Dari teori diatas dapat dijadikan acuan melaksanakan penelitian terkait pembiasaan program usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) di Kecamatan Lubuk sikaping Kabupaten Pasaman.

1. Adanya pemberian bimbingan

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seseorang ahli kepada individu dengan menggunakan berbagai prosedur, cara, dan bahan supaya individu tersebut mampu mandiri dalam masalah-masalah yang di hadapinya .

Pemberian bimbingan sangat penting dilakukan oleh pihak DPPKB kepada masing-masing kelompok UPPKS supaya setiap anggota dapat mengetahui bagaimana cara pengelolaan sebuah organisasi, agar setiap kelompok yang terbentuk menjadi kelompok yang lebih baik sehingga bisa menjadi kelompok usaha yang terus berinovasi, pihak Dinas selaku Pembina hendaknya rutin memberikan pelatihan kepemimpinan dalam sebuah organisasi kepada masing-masing ketua kelompok agar kelompok yang dikelolanya dapat terus aktif dan melakukan inovasi secara terus menerus kedepannya, sehingga nantinya setiap kelompok dapat terus aktif melakukan kegiatan usaha dan dapat dikelola dengan baik, karena ketua kelompoklah yang bertanggung jawab kepada setiap anggotanya apakah terus aktif atau hanya berjalan di tempat.

Berikut wawancara penulis dengan Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga selaku Pembina kelompok UPPKS :

'Pelaksanaan Kegiatan dengan pemberian bimbingan ini kepada kelompok-kelompok usaha sangatlah penting supaya setiap

kelompok yang dibina tidak kebingungan dalam mengambil keputusan, kami memberikan arahan kepada setiap pengurus kelompok UPPKS ini bila ada keluhan /masalah dalam kelompok tersebut dan kegiatan pemberian bimbingan ini hanya kami lakukan kepada kelompok yang masih terus aktif dan belum semua kelompok kami kunjungi karena berbagai hal, tapi kegiatan ini akan terus kami lakukan'(wawancara dengan Ibu Maiyarni Lubis S,Ag Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DPPKB selaku Pembina kelompok UPPKS, 25 Juli 2019)

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program ini belum berjalan maksimal, Dinas baru menyelenggarakan pembinaan rutin kepada kelompok yang terus berkembang, tapi belum pasti kepada kelompok-kelompok yang mengalami masalah atau tersendat dalam berwirausaha.

Kegiatan pemberian bimbingan ini sebenarnya sangat dibutuhkan oleh kelompok-kelompok usaha yang ada, karena saat ini sudah banyak kelompok UPPKS yang terbentuk dan diharapkan untuk dapat terus aktif dan tujuan agar pelaksanaan program pembinaan keluarga sejahtera ini dapat tercapai.

Berikut ini pendapat dari salah satu pengurus atau ketua kelompok UPPKS di Kecamatan Lubuk sikaping Kabupaten Pasaman :

Saya sudah menjadi pengurus kelompok UPPKS ini sejak tahun 2014 atau mulai dari kelompok ini berdiri, kami jarang mendapat bimbingan bahkan pihak dinas mengunjungi kami bisa dikatan dua kali dalam setahun, bimbingan ini saya rasa sangat penting dalam mengelola sebuah

kelompok saya mengakui kesulitan karena yang bertanggung jawab adalah pengurusnya, bahkan saya melihat kelompok-kelompok lain banyak yang tidak aktif karena ketua tidak sanggup mengelola kelompoknya. **(wawancara dengan ibu Efnida ketua kelompok UPPKS, usaha bersama, 27 juli 2019).**

Dari wawancara tersebut dapat diketahui ketua pengurus UPPKS membutuhkan bimbingan dari Dinas DPPKB karena Dinaslah yang melaksanakan kegiatan ini untuk mewujudkan program ini berhasil, dengan demikian Dinas harus segera melaksanakan pemberian bimbingan sebagaimana yang disampaikan oleh Kabid dinas DPPKB diatas untuk melaksanakan bimbingan kepada kelompok-kelompok UPPKS yang ada di kecamatan lubuk sikaping ini.

Bimbingan kepada pengurus kelompok ini harus dilaksanakan secepat mungkin karena semakin lama pengurus ketua kelompok-kelompok ini tidak bisa membina kelompoknya lagi dan akhirnya kelompok itu vakum atau tidak aktif berkegiatan lagi

2. Pemberian wadah

.Wadah merupakan tempat untuk menyalurkan potensi. dalam pelaksanaan UPPKS wadah merupakan pemberian tempat fasilitas yang akan digunakan untuk melaksanakan usaha kelompok dengan maksud memanfaatkan potensi berupa sumber daya alam di wilayah mereka untuk diolah menjadi sumber usaha. Dengan adanya wadah yang diberikan kepada kelompok usaha UPPKS ini akan memberikan motivasi yang sangat besar bagi mereka untuk dapat berwirausaha dengan lebih kreatif dalam menggali potensi untuk bisa bersaing dengan didunia usaha,

motivasi tersebut akan membuat kelompok lebih gigih dalam mengeluarkan kreatifitasnya dalam usaha yang sebelumnya menjadi lebih baik lagi.

Beberapa usaha kelompok UPPKS di Kecamatan lubuk sikaping ini merupakan usaha kerajinan dan pembuatan makanan seperti pembuatan bed cover, keripik pisang, dll, untuk proses pembuatan bed cover tersebut membutuhkan mesin jahit yang digunakan oleh masing-masing anggota kelompok, mesin jahit ini didapat dari modal kelompok dan bantuan dari dinas DPPKB Kabupaten pasaman.

Berikut wawancara penulis dengan pengurus kelompok UPPKS tentang pemberian bantuan modal usaha menjahit :

'Usaha kelompok yaitu membuat bed cover seperti spreid, dan sarung bantal, jumlah anggota dalam kelompok ini ada 12 orang sedangkan mesin jahit yang tersedia hanya Sembilan, enam mesin jahit ini didapat dari modal kelompok yang kami pinjam dari bank dan yang tiga lainnya dapat dari bantuan dinas, untuk itu kalau bisa saya berharap ada bantuan dari dinas untuk tambahan mesin jahit lagi.' **(wawancara dengan ibu Efnida ketua kelompok UPPKS, 27 juli 2019)**

Dari wawancara diatas diketahui kelompok tersebut kekurangan sarana dalam menjalankan usaha, tentu masalah tersebut bisa saja mengganggu kelancaran dalam memproduksi hasil usaha, sebab itu pihak Dinas selaku Pembina sangat diharapkan bisa membantu masalah tersebut, apalagi Dinas juga kesulitan mencari tambahan sumber modal bagi masing-masing kelompok.

Berikut wawancara penulis dengan kadis DPPKB Kabupaten Pasaman tentang

pemberian sarana produksi usaha kepada kelompok UPPKS:

'Soal sarana kelompok kami dari Dinas hanya mampu memfasilitasi sebisanya, karena perlengkapan usaha itu diambil dari dana modal. Jadi tidak semua kelompok kami bisa bantu, karena kelompok yang bisa dikatakan berhasil yang bisa mengatasi masalah tersebut karena usaha kelompok mereka sudah balik modal untuk mencukupinya, soal pinjaman kami juga kesulitan mendapatkannya karena yang kami harapkan kerjasama dengan mitra lain untuk mendapat bantuan.'(wawancara dengan Ibu Willerni.S.H Kadis DPPKB Kabupaten Pasaman, 2 Agustus 2019).

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa pihak Dinas kesulitan mencari mitra kerja untuk menjalin kerja sama memperoleh bantuan, untuk masalah tersebut pengurus kelompok harus mencari dana karena mereka hanya mengandalkan pinjaman dari bank guna memfasilitasi kelompoknya sehingga tidak mengganggu produksi usaha, selain perlengkapan kelompok juga mengeluhkan sulitnya mencari tempat pemasaran karena banyaknya saingan usaha diluar oleh karena itu kelompok UPPKS sangat mengharapkan diberi tempat pemasaran supaya produksi mereka dapat terus berjalan.

Seperti pernyataan ibu efnida selaku ketua pengurus kelompok UPPKS berikut ini :

Sebagian kelompok memang memasarkan produknya secara manual tidak menggunakan iklan karena keterbatasan modal, jadi hasil usaha kelompok kami ini kadang dibawa keacara-acara pameran, bazar dikecamatan maupun kabupaten ,jadi kami rasa usaha tersebut kurang

memuaskan karena belum ada yang menjamin kepastian pemasaran ini, sehingga banyak anggota kelompok saya yang menjual sendiri-sendiri, untuk itu pihak dinas kami minta keputusan apakah pemasaran kelompok ini dilakukan dengan bekerja sama dengan mitra lain atau menjual produk ini sendiri dipasaran.(wawancara dengan ibu efnida ketua kelompok UPPKS, 27 juli 2019).

Dari pernyataan tersebut diketahui kelompok masih kesulitan memasarkan usahanya karena belum ada wadah pasti memasarkan produk tersebut karena selama ini produksi tersebut dipasarkan di acara bazar, dan pameran tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten, untuk itu pihak Dinas selaku Pembina harus mendampingi kelompok tersebut sampai ke pemasaran

3. Pelatihan dan pengembangan karir

Pelatihan dan pengembangan karir usaha merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh dinas DPPKB selaku Pembina dari kelompok-kelompok UPPKS ini agar para anggota kelompok tambahan ilmu pengetahuan yang membuat mereka lebih kreatif dan membuat inovasi dalam berwirausaha dari yang sebelumnya sesuai dengan bidang-bidangnya. Karena dengan memberikannya pelatihan dapat menggerakkan pikiran, ide-ide, dan inovasi baru yang akan menghasilkan produksi yang lebih inovatif. Dengan adanya pendidikan dan pelatihan ini seseorang bisa mempelajari sesuatu yang baru dan belum pernah mereka coba dan akhirnya mereka mempraktekkanya dan memberikan inovasi baru kepada produksi mereka yang sebelumnya.

Maksud pendidikan dan pelatihan ini yaitu memberikan pelatihan terhadap

kelompok-kelompok UPPKS ini agar mendapatkan ilmu baru dan menambah pengetahuannya di bidang usaha menjadi bertambah, dengan membuat anggota-anggota kelompok ini menggabungkan ilmu yang telah dimilikinya dengan ilmu baru yang diterimanya di pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas DPPKB Kabupaten Pasaman ini.

Berikut penulis mewawancarai kepala bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga selaku Pembina kelompok UPPKS tentang pemberian pendidikan dan pelatihan kepada kelompok UPPKS :

*'Pelatihan yang diberikan oleh Dinas DPPKB untuk kelompok UPPKS dilakukan secara tematik, melalui kerja sama dengan sektor kedinasan lainnya misalnya kerja sama dan berkoordinasi dengan dinas sosial ketenagakerjaan kabupaten Pasaman sejak tahun 2017 untuk latihan menjahit dan peserta menjahit itu ada dari kelompok UPPKS'.***(wawancara dengan Ibu Maiyarni Lubis S,A,g Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DPPKB Kabupaten Pasaman selaku Pembina Kelompok UPPKS, 25 Juli 2019)**

Dari wawancara tersebut Dinas DPPKB Kabupaten Pasaman telah melaksanakan pelatihan kepada kelompok-kelompok UPPKS , karena pelatihan tersebut sangat berguna bagi pembinaan kelompok usaha ini, karena tanpa pelatihan kelompok usaha ini tidak akan berkembang karena pendidikan pelatihan ini dapat mengembangkan potensi ilmu yang dimilikinya.

Kegiatan pelatihan ini diselenggarakan oleh Dinas DPPKB Kabupaten Pasaman adalah pelatihan menjahit yang bekerja sama dengan dinas sosial ketenagakerjaan Kabupaten Pasaman telah melaksanakan

pelatihan ini selama 2 tahun mulai tahun 2017, namun belum ada yang diperuntukan khusus bagi kelompok UPPKS seperti yang disampaikan oleh ketua pengurus kelompok UPPKS berikut ini :

'Pelatihan menjahit yang pernah dilaksanakan oleh Dinas DPPKB dan bekerja sama dengan dinas lain ,anggota UPPKS yang ikut pelatihan menjahit memang anggota yang telah memiliki kemampuan menjahit, kemampuan menjahit yang dimiliki anggota itu masih menggunakan alat-alat jahit tradisional, dalam pelatihan tersebut peserta dilatih merancang pakaian menggunakan alat-alat perancang (design) modern. (wawancara dengan ibu Efnida ketua pengurus kelompok UPPKS, 2 Agustus 2019)

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa peran Dinas DPPKB sebagai fasilitator pembinaan kepada kelompok UPPKS belum ada kegiatan khususnya, melainkan kegiatan kerja sama dengan instansi lain.kegiatan pelatihan dilaksanakan oleh Dinas DPPKB dengan ketenagakerjaan untuk membuka lapangan kerja baru untuk mengatasi pengangguran dan setiap ada pelatihan diharapkan ada dari kelompok UPPKS.

Berikut wawancara penulis dengan salah seorang anggota kelompok UPPKS yang aktif mengikuti pelatihan ini:

*Saya mengikuti pelatihan ini untuk memantapkan dan kemahiran dalam bekerja sedangkan keterampilan dalam usaha UPPKS didapat dari orang tua yakni menjahit.***(wawancara dengan Ibu Rahma anggota kelompok UPPKS, 4 Agustus 2019)**

Dari pernyataan di atas diketahui keterampilan yang dimiliki anggota UPPKS

ini merupakan keterampilan yang telah ada yang di dapat belajar dari orang tua sebelum masuk menjadi anggota kelompok UPPKS. Artinya Dinas DPPKB belum memberi pelatihan secara khusus kepada kelompok UPPKS yang baru memantapkan kemahiran bekerja, karena itu para anggota mengharapkan pelatihan mulai dari dasar kelompok usaha ini berdiri.

Seperti yang di sampaikan oleh seorang anggota kelompok UPPKS ibu rahma evita berikut ini :

'Kemaren kami diberi pelatihan membuat dan menjahit oleh Balai Latihan Kerja (BLK) artinya Dinas DPPKB tidak ikut serta memberi pelatihan kepada kami tentunya kami sangat membutuhkan bimbingan pelatihan usaha dari Dinas DPPKB sebagai Pembina kelompok UPPKS.(wawancara dengan ibu Rahma anggota kelompok UPPKS, 4 Agustus 2019)

Dari informasi yang diberikan oleh pengurus kelompok ini tentunya menjadi perhatian yang serius bagi Dinas DPPKB selaku Pembina kelompok UPPKS ini, Dinas tentunya tidak boleh hanya membrikan pelatihan kepada yang sudah bisa/memiliki keterampilan saja tapi kepada semua yang belum memiliki kemampuan dalam membuat sesuatu keterampilan dan juga Dinas DPPKB masih belum punya pelatihan khusus bagi anggota kelompok UPPKS ini dalam menyeragamkan keterampilan usaha didalam satu kelompok usaha UPPKS yang menjadi binaanya.

4. Pemberian pengawasan dan tinjauan kelapangan

Tinjauan kelapangan merupakan bentuk pengawasan dari Dinas yang langsung mendatangi kegiatan usaha para

anggota kelompok yang telah diberi pembinaan. Karena kegiatan ini begitu penting dilaksanakan supaya kita dapat melihat kegiatan-kegiatan dan juga hambatan-hambatan yang terjadi selama pelaksanaan program ini berlangsung sehingga pihak Pembina dapat membuat keputusan-keputusan mengenai hal-hal tersebut.

Dalam kegiatan ini Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten pasaman sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program usaha kelompok ini harus terjun kelapangan, hal tersebut berguna demi kelencaran pelaksanaan program pembinaan usaha ini, dengan melaksanakan pengecekan kelapangan Dinas DPPKB dapat mengetahui apakah pelaksanaan program usaha ini berjalan dengan baik, dan apakah program-program tersebut diikuti berdasarkan binaan Dinas DPPKB Kabupaten Pasaman.

Dengan melakukan kegiatan terjun kelapangan pihak Dinas dapat melihat keseriusan kelompok UPPKS ini menjalan usahanya sesuai yang diharapkan dan juga kendala-kendala yang dihadapi kelompok-kelompok UPPKS tersebut. Dalam wawancara saya dengan kabid Dinas DPPKB Kabupaten Pasaman selaku Pembina kelompok UPPKS mengatakan bahwa kunjungan mereka pada kelompok-kelompok UPPKS yaitu :

Kegiatan mengunjungi dengan terjun langsung ke lapangan merupakan kegiatan yang kami lakukan setiap akan ada pembentukan kelompok baru , bantuan modal dan memasarkan hasil produksi mereka, kami memastikan mendata setiap kelompok-kelompok UPPKS ini apakah aktif dalam beregiatan sampai saat ini. (Wawancara dengan Ibu Willerni S,H

Kasi Dinas DPPKB Kabupaten Pasaman selaku Pembina Kelompok UPPKS, 29 Juli 2019).

Dari pernyataan Kabid diatas diketahui pihak Dinas DPPKB melaksanakan kunjungan setiap akan ada pembentukan kelompok baru, memberikan bantuan modal, dan membantu memasarkan hasil produksi mereka, namun pernyataan dari ketua kelompok UPPKS yang saya wawancarai mengatakan kunjungan dari pihak Dinas sangat jarang dilakukan seperti yang penulis wawancarai berikut ini

'...Kelompok kami didatangi oleh Dinas sekitar enam bulan yang lalu ketika memberikan bantuan modal kepada kami, kami lebih sering di telfon dari Dinas mengenai hambatan-hambatan yang kami temukan dalam menjalankan usaha ini , dan untuk memasarkan produk kami sudah menghubungi dinas tapi belum dikunjungi sampai saat ini.(wawancara dengan ketua kelompok UPPKS ibu Efnida 27 juli 2019).

Menurut penulis pihak Dinas selaku Pembina sangat jarang memantau aktivitas kelompok UPPKS, mereka lebih sering dihubungi melalui telfon dari Dinas tentang aktivitas mereka apakah masih aktif atau tidak.

Seperti yang disampaikan oleh ibu Efnida ketua pengurus kelompok UPPKS usaha bersama berikut ini :

Kunjungan Dinas memang jarang sekali karena mereka menganggap kelompok UPPKS ini sejak berdiri sampai melakukan pemasaran pasti kelompok ini sudah mandiri karena kami sudah sering melapor ke Dinas tetapi tidak ada juga tanggapan mengenai kesulitan pemasaran usaha. .(wawancara dengan Ibu Efnida ketua

kelompok UPPKS “karya mandiri”, 27 Juli 2019)

Informasi yang di sampaikan oleh ibu Efnida tersebut harus menjadi perhatian bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman untuk melaksanakan pembinaan kelompok UPPKS ini agar kelompok –kelompok tersebut dapat terus aktif dan bersemangat dalam berwirausaha, sehingga kelompok-kelompok yang masih aktif ini dapat terus berkembang seperti tujuan pelaksanaan program ini.

2. Faktor-Faktor penghambat Pembinaan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.

Dalam hal pelaksanaan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dikecamatan lubuk sikaping kabupaten pasaman, para pihak-pihak yang bersangkutan seperti pembina, peserta anggota kelompok UPPKS ini sudah cukup baik, karena kelompok UPPKS ini berharap kedepannya pelaksanaan program UPPKS ini tidak hanya sekedar melakukan pembinaan tetapi juga meningkatkan kualitas hidup para pesertanya, namun dalam menjalankan pelaksanaannya program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di kecamatan lubuk sikaping kabupaten pasaman masih memiliki beberapa hambatan yaitu :

1. Sumber daya manusia

Kualitas sumber daya manusia merupakan hal utama dalam menjalankan usaha UPPKS, keberhasilan usaha tergantung bagaimana ketua kelompok

memimpin dalam membagi tugas kepada anggotanya dibawah binaan dinas DPPKB .

Tingkat kualitas SDM merupakan hal utama dalam menghadapi dunia pasar usaha yang semakin dinamis dan kompetitif karena sebagai penggerak usaha kelompok –kelompok UPPKS ini harus mampu mencari peluang usaha dan keaktifan melakukan komunikasi dengan jaringan luar karena produsen itu sifatnya mencari pembeli bukan menunggu jadi, untuk itu diperlukan pembinaan dan pelatihan usaha untuk meningkatkan SDM seperti manajemen keuangan dan

pemasaran produksi dan pembukuan administrasi keuangan yang membantu mereka untuk meningkatkan hasil produksi semaksimal mungkin mulai dari modal pengerjaan, proses hingga pemasaran produk-produk hasil usahanya

Berikut hasil wawancara dengan informan penelitian :

“dalam pengembangan keterampilan anggota-anggota kelompok ini harus memberikan kontribusi dalam arti produktivitas yang sesuai dengan yang di rencanakan oleh kelompok yang bersangkutan, dalam pelaksanaan UPPKS ini masih banyak anggota yang belum menguasai sarana teknologi dan informasi contohnya masih kesulitan dalam memasarkan produknya melalui jaringan internet atau online yang bisa memudahkan dalam hal transaksi, mereka masih menggunakan cara-cara manual.”(wawancara dengan **Kabid Ketahanan dan Keluarga Sejahtera DPPKB selaku Pembina Kelompok UPPKS, 25 Juli 2019**)

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan DPPKB selaku Pembina

kelompok mengharapkan anggota-anggota kelompok yang sudah diberi pelatihan harus mampu menguasai teknologi dan kemampuan mencari komunikasi dengan jaringan pasar yang lebih luas dan produk tersebut juga dikenal luas banyak orang, masih rendahnya pengetahuan tentu menjadi penghambat kemandirian anggota kelompok UPPKS ini, untuk itu pihak Dinas harus lebih giat dan tanggap lagi dalam melakukan pembimbingan dalam hal pendidikan dan pelatihan kelompok-kelompok UPPKS tersebut

2. Anggaran modal

anggaran dalam usaha adalah modal yang merupakan dana yang diperlukan untuk membuat sebuah usaha untuk mencapai tujuan yang ingin di capai. Dalam menjalankan usaha kelompok UPPKS para anggota mengaku terkendala akan modal untuk memulai sebuah usaha, modal yang selama ini didapat dari bantuan pemerintah tidak lagi mereka dapatkan, selain itu bantuan yang diterima dari Badan Amil Zakat(BAZ) hasil kerja sama antara DPPKB dengan BAZNAS juga terhenti seiring banyaknya kelompok UPPKS yang tidak aktif lagi.

Berikut hasil wawancara informan penelitian dengan Kabid DPPKB selaku Pembina kelompok UPPKS :

‘ Untuk modal kelompok UPPKS itu ada dari BAZNAS ,namun itu hanya sampai tahun 2017 , sekarang ini ada dari kami yang diberikan dalam bentuk pinjaman, besarnya pinjaman tergantung dari besarnya usaha yang dikerjakan oleh suatu kelompok ,pinjaman ini kami berikan melalui bank yang kami serahkan kepada masing-masing ketua kelompok, pinjaman ini di berikan supaya nantinya balik modal dana tersebut dikembalikan kepada pihak

DPPKB yang selanjutnya digulirkan kekelompok lain.. besarnya pinjaman ini berkisar 5-7 juta rupiah'.(wawancara dengan Ibu Willerni S.H kasi DPPKB, selaku Pembina kelompok UPPKS, 4 Agustus 2019)

Dari wawancara diatas diketahui pihak DPPKB telah memberi dana pinjaman bank kepada setiap kelompok, dan ketua kelompok mengatur semua sampai produk-produk hasil usaha dapat dipasarkan ,apabila dana tersebut sudah balik modal dan tersebut dikembalikan kepada Pembina untuk digulirkan sebagai modal oleh kelompok lain.

Seperti yang di ungkapkan ibu rahma anggota kelompok UPPKS :

Faktor penghambatnya lebih ke pada modal yang kurang , karena untuk melaksanakan usaha diperlukan modal yang cukup, karena dalam memproduksi membutuhkan tempat, alat dan bahan-bahan produksi , bantuan yang pernah disalurkan juga masih kurang. (wawancara dengan Ibu Rahma anggota kelompok UPPKS, 4 Agustus 2019)

Dari pernyataan diatas diketahui modal merupakan hal utama untuk melaksanakan usaha karena tanpa modal yang cukup kelompok akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha. Ibu rahma merupakan anggota kelompok UPPKS usaha bersama yang menjalankan usaha pembuatan bed cover/sprei dan memproduksi keripik singkong yang dijual di warung-warung rumahnya.

3.Akses pemasaran

Pemasaran produk hasil usaha kelompok UPPKS dilakukan secara manual tidak menggunakan iklan di beberapa media seperti cetak dan elektronik karena kelompok merasa terbatasnya anggaran

untuk memasarkan produk mereka dan memilih menjualnya secara manual.

Berikut pernyataan ketua kelompok UPPKS bu Efnida :

Untuk pemasaran hasil usaha produksi anggota-anggota kelompok ibuk ini menitipkan semua hasil usaha dirumah ibuk, mereka berharap ibu yang mencari semua pembeli, mereka tidak mau menjual sendiri-sendiri karena takut tidak laku.untuk itu saya berharap menjual sendiri-sendiri supaya mendapat untung sendiri, jadi saya berharap urusan pemasaran ini dapat dibantu oleh pihak dinas agar saya sebagai pengurus tidak kesulitan memasarkan usaha kami, setahu saya pihak Dinas menganggap kami sudah mandiri.(wawancara dengan Ibu Efnida ketua kelompok UPPKS “usaha bersama”, 5 Agustus 2019)

selama ini pihak Dinas hanya menyarankan supaya kelompok sendiri yang memasarkannya dengan menitipkannya pada toko-toko atau warung-warung dan memberi informasi ketika ada pameran kerajinan dan acara bazar, untuk itu pihak Dinas selaku Pembina diharapkan mendampingi kelompok tersebut untuk membantu mencari jaringan komunikasi yang mampu menembus pasar-pasar yang lebih luas, pengetahuan yang kurang akan akses informasi dan komunikasi dan manajemen pemasaran dari kelompok-kelompok UPPKS ini menjadi kendala dalam menjalankan usaha, karena akses penjualan produk merupakan hal yang penting bagi mereka agar bisa bersaing dengan produk lain didunia usaha.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang peneliti lakukan tentang Pembinaan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di

Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman sebagai berikut :

1. Pembinaan program UPPKS yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana(DPPKB) kabupaten pasaman belum optimal, hal ini bisa dilihat dari kondisi kelompok-kelompok UPPKS yang belum mandiri, hal ini dikarenakan kurangnya bimbingan kepada para kelompok UPPKS ini yang masih kesulitan dalam mengembangkan usahanya karena dinas belum rutin melaksanakan bimbingan, tetapi pihak Dinas menyebut bimbingan ini adalah hal penting dilakukan tetapi masih jarang dilaksanakan, pembinaan yang kedua yakni memberi wadah usaha kepada setiap kelompok UPPKS yang membutuhkan seperti tempat melaksanakan usaha termasuk sarana dan pra sarana dalam berwirausaha,tetapi Dinas DPPKB selaku Pembina masih kesulitan mencari bantuan hal tersebut membuat kelompok-kelompok kekurangan sarana usaha hal tersebut tentu menjadi perhatian dari Dinas DPPKB karena menjadi tanggung jawabnya.pembinaan yang ketiga yakni memberi pelatihan atau pendidikan kepada anggota kelompok, disini Dinas memberi pelatihan mengembangkan diri dalam berwirausaha kepada anggota kelompok UPPKS, tetapi Dinas DPPKB selaku Pembina belum memiliki program khusus pelatihan yang dikhususkan untuk peserta kelompok UPPKS. Kegiatan pembinaan keempat yakni pemantauan langsung ke lapangan, pihak Dinas DPPKB selaku Pembina

belum dijalankan serius oleh Dinas. Dinas memantau kelapangan jika ada kegiatan pembentukan kelompok. Dinas tidak melihat aktivitas perkembangan kelompok yang ada.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan yang pertama yakni sumber daya manusia, adanya dorongan dari pelaku usaha akan membuat program usaha yang dijalankan akan cepat berkembang tapi masih kurangnya kemampuan akan keterampilan berwirausaha para anggota kelompok sehingga menghambat inovasi usaha yang mereka kelola , selain itu rendahnya penguasaan teknologi dalam hal pemasaran juga menghambat usaha ini sulit berkembang Faktor yang kedua yakni anggaran modal, modal yang cukup akan membuat usaha akan berjalan tanpa hambatan tetapi kelompok UPPKS ini masih kesulitan menacri sumber modal , karena hal tersebut Dinas selaku Pembina harus bertanggung jawab.faktor yang ketiga adalah akses pemasaran, Dinas DPPKB selaku Pembina tidak tahu cara membantu memasarkan hasil produksi usaha kelompok UPPKS hal tersebut membuat kelompok UPPKS kesulitan memasarkan produknya karena bersaing di dunia usaha memang tidak mudah.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang akan penulis sampaikan sehubungan dengan pelaksanaan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, yaitu :

1. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana(DPPKB) kabupaten pasaman harus segera melaksanakan bimbingan kepada kelompok-Kelompok UPPKS agar pengurus kelompok UPPKS tersebut dapat memajemen kelompoknya dengan baik, serta membantu sarana dan prasarana kegiatan usaha kelompok supaya kelompok UPPKS ini tidak kekurangan perlengkapan.selanjutnya Dinas harus memiliki program khusus pelatihan bagi anggota-anggota kelompok, pelatihan yang terstruktur dan menyeluruh, dan yang terakhir Dinas harus terjun kelapangan untuk mengetahui masalah-masalah yang muncul dalam pelaksanaan aktivitas usaha UPPKS tersebut.
2. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana(DPPKB) selaku pembina harus senantiasa bertanggung jawab dalam setiap tahap kegiatan pelaksanaan program pembinaan masyarakat, karena masyarakat yang bersangkutan memiliki tingkat pendidikan dan pola pikir yang masih tergolong rendah.
3. Faktor-faktor mempengaruhi pembinaan program UPPKS yaitu sumber daya manusia, Dinas DPPKB selaku penanggung jawab kelompok harus memiliki SDM yang memadai dengan menambah para penggerak KB atau penyuluh KB di lapangan sebagai penghubung antara Dinas DPPKB dengan kelompok binaanya supaya mengetahui keseluruhan kegiatan usaha tersebut. Sedangkan untuk promosi produk usaha kelompok

UPPKS harus menggunkan promosi lewat internet agar lingkup pemasarannya lebih luas, dan khusus buat produk olahan harus mendapatkan mutu supaya masyarakat yakin akan suatu produk yang dikonsumsi. Selain itu bagi pihak Dinas DPPKB harus mencari sosok penggerak motivasi usaha yang bisa menggerakkan program UPPKS ini dapat berkembang karena program tersebut bukan program baru lagi yang dilaksanakan oleh pemerintah jika hal tersebut tidak di atasi pemerataan kesejahteraan masyarakat menengah kebawah tidak akan pernah terwujud yang selama ini dicanangkan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ruky.2006. *Sumber Daya Manusia Berkualitas*,Jakarta. PT Gramedia pustaka
- Badrudin,2014.*Dasar-dasar manajemen*. Bandung:penerbit Alfabeta
- G ,RTerry, George.2010.*Dasar-Dasar Manajemen*..Cetakan Kesebelas.Jakarta:PT Bumi Aksara
- .Alama,Buchari.2009.
- G ,R Terry .2010.*Manajemen Sumber Daya Manusia*.Edisi Pertama.Jakarta:PT Bumi Aksara.
- J Winardi. 2003. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Kurniasih, Vera Ari, 2010, *Pelaksanaan Program UPPKS Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Oleh Badan PP,*

- PA, Dan KB Kabupaten Karanganyar. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Universitas sebelas maret Surakarta.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosdakarya: Bandung.
- Malayu S.P. Hasibuan, 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Malayu S.P. Hasibuan., 2008. *Organisasi dan motivasi dasar peningkatan produktifitas*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Mangunhardjana, 2004. *Pembinaan arti dan metodenya*, Jakarta: salemba empat
- Nugroho, Riant. 2006. *Faktor-Faktor Dalam Pembinaan*, Jakarta: Rajawali
- Sugiyono, 2010, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Siagian, Sondang P. 2006, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara
- Sopratikno, 2001. *Pembinaan organisai*. Jakarta: PT raja grafindo persada
- Santoso, 2010. *Supervisi Pembelajaran Untuk Pembinaan Professional*. Jakarta : Balai Pustaka
- Thoha, Miftah. 1997. *Pembinaan Organisasi : Proses Diagnosa dan Intervensi*. Rajawali:
- Terry, George. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Cetakan Kesebelas. Jakarta: PT Bumi Aksara. Alama, Buchari. 2009.
- Usman, Sunyoto, 2010. *Pemberdayaan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Dokumen :
- BPPKB, Pasaman, 2017, *Perjanjian kerja sama antara Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman dengan BAZNAS Kabupaten Pasaman tentang penyaluran dana Badan Amil Zakat Nasional ke kelompok UPPKS NO : 476/351/BPP-KB/2017*.
- BPPKB, Pasaman, 2017, *Hasil Pendataan Keluarga Di Kabupaten Pasaman Tahun 2017*, pasaman: BPPKB
- Dianto, Icol, 2017, *Pemberdayaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Pasaman*. Jurnal.

*Undang-undang nomor 52
tahun 2009 tentang
perkembangan
kependudukan dan
pembangunan keluarga
sejahtera.*

Dokumentasi :

undang undang nomor 52 tahun 2009
tentang perkembangan kependudukan
dan pembangunan keluarga sejahtera .

Keputusan dari Kepala Dinas Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pasaman Nomor :
476/130.A/BPP-KB/2018. Tentang
pengukuhan dan penunjukan Pembina
kelompok UPPKS kabupaten pasaman.